

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHU (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH LEUWIGAJAH)

**Hardani Wijaya<sup>1</sup>; Heru Nurasa<sup>2</sup>; Elisa Susanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
hardani15001@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup> ; heru.nurasa@unpad.ac.id<sup>2</sup>; elisa.susanti@unpad.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This thesis is the result of research on the Implementation of Waste Management Policy in the Cimahi City Agency (Study: LeuwiGajah Area). This research is motivated by the authors' interest in waste management policies in Cimahi City. The Cimahi City Government issued Regional Regulation No. 6 of 2019 concerning waste management as an effort to resolve it in Cimahi City. In areas that are particularly LeuwiGajah, waste has become a major problem.*

*In tracing the above problem, this research uses the theory of policy implementation by Michael Hill and Peter Hupe which includes policy characteristics, poliicy formation (in much of the literature seen as efforts to structure policy from the 'top'), issues about 'layers' in the policy transfer process, or what we call 'vertical public administration', factors affecting the responses of implementation agencies, horizontal inter-organizational relationships, and the impact of responses from those affected by the policy. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data obtained through library studies and field studies (observation and interviews). The technique of determining the informant is using purposive sampling technique. The results of this study indicate that the Implementation of Waste Management Policy in the Bandung Regency Environmental Agency (Study: LeuwiGajah Area). Of the seven success factors for policy implementation proposed by Michael Hill and Peter Hupe there are factors that most influence the ineffectiveness Implementation of Waste Management Policy in the Bandung Regency Environmental Agency (Study: LeuwiGajah Area). This factor is the attitude of implementing waste management policies in Cimahi City, which must play an active role in socializing so that the community takes an active role, the simplest example is throwing garbage in its place, not littering. This is because there are no clearly regulated rewards and punishments.*

**Keywords : Implementation, Waste Management, Local Government**

### ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian di Kabupaten Bandung. Di wilayah yang khususnya di LeuwiGajah da tumpukan sampah menjadi menjadi masalah utama. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe yang mencakup Karakteristik Kebijakan, Formasi Kebijakan, Proses Transfer Kebijakan, Faktor yang Mempengaruhi Badan Pelaksana, Hubungan Inter-Organisasi Horizontal, Respon Kelompok Sasaran, dan Faktor Lingkungan Eksternal.*

*Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Dari ketujuh faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe terdapat faktor yang paling mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan kawasan pengelolaan sampah di Kota cimahi. Faktor tersebut adalah sikap pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi ini yang harus berperan aktif bersosialisasi agar masyarakatnya ikut berperan aktif contoh yang paling sederhana membuang sampah pada tempatnya tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya reward dan punishment yang diatur dengan jelas.*

**Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah**

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang hingga kini masih dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota ialah masalah sampah. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya jumlah penduduk di suatu tempat serta meningkatnya aktivitas masyarakat tersebut yang mengakibatkan pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Selain itu juga dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah banyak menumpuk di pinggir jalan, di gorong-gorong dan di sungai.

Hal itu pula yang terjadi pada Pemerintah Kota Cimahi. Dengan jumlah Penduduk Kota Cimahi yang cukup padat Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah penduduk Kota Cimahi per tanggal 31 desember 2019 adalah 553.755 jiwa, sehingga dapat diketahui potensi timbulan sampah tingkat Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah 99.039,082 ton/tahun. membuat tugas Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola sampah menjadi semakin bertambah, dimana sampah yang ditanggung oleh Kota Cimahi dari hari ke hari menjadi semakin berat.

Berdasarkan wawancara dengan Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, tingginya tumpukan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah juga diperburuk dengan jenis karakteristik penghasil timbunan sampah terbesar setelah wilayah Melong yaitu berasal dari daerah permukiman atau sampah rumah tangga yang umumnya merupakan sampah organik yang mempunyai kadar air yang cukup tinggi. Dengan karakteristik sampah tersebut, maka sehari saja sampah dibiarkan menumpuk akan terjadi kegiatan mikroorganisme anaerobik yang menyebabkan sampah berbau.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Terdapat beberapa hal yang belum sesuai apabila ditinjau dari peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti yakin bahwa pelaksanaan Perda nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal seluruhnya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Sebagaimana baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Beranjak dari berbagai permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota

Cimahi (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah)".

## METODE PENELITIAN

Dalam meneliti "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah)", penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih penulis karena penelitian ini memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam dari partisipan terkait serta penulis ingin memahami lebih mendalam terkait fenomena yang penulis teliti. Dalam pengumpulan informasi tentang "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah)", penulis menggunakan bantuan data primer dan sekunder berupa Studi kepustakaan dengan referensi dan peraturan terlampir, Studi lapangan dengan observasi dan wawancara dengan pihak terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Penulis membutuhkan informan untuk memperoleh hasil penelitian lebih mendalam terkait kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Teknik penentuan informan dengan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini merupakan cara yang digunakan dalam menentukan individu yang sesuai dengan apa yang diteliti dikarenakan pengalaman yang dimiliki individu tersebut terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis pun melakukan teknik analisis data guna memperdalam pemahaman peneliti atas data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan sejak pra-lapangan, ketika di lapangan, dan setelah di lapangan serta analisis lebih lanjut jika diperlukan guna memperoleh data yang kredibel.

Dalam menguji kredibilitas hasil lapangan, penulis pun menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan dua teknik yaitu sumber dan teknik. Triangulasi sumber dengan Data yang diperoleh dari beberapa dinas terkait dideskripsikan, kategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Triangulasi teknik dengan Dapat diperoleh dengan wawancara, lalu diperiksa dengan observasi kemudian dengan dokumentasi.

## PENELITIAN TERKAIT

Disampaikan oleh Penelitian relevan yang pertama yaitu membahas mengenai perilaku masyarakat yang membuang sampah ke drainase dan juga membahas masih banyak masyarakat yang membuang sampah diluar waktu yang ditentukan dan juga membuang sampah ke pinggir jalan (TPS liar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan dan dianalisa dengan teknik tringulasi data, yaitu hasil

wawancara yang digabungkan dengan data yang didapat dan digabung dengan pendapat peneliti sesuai observasi hasil di lapangan. Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu faktor internal dan eksternal. Pada umumnya kedua faktor ini yang memiliki faktor yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. (Irna, 2017)

Selanjutnya dalam jurnal yang kedua membahas mengenai permasalahan keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA yang menyebabkan tumpukan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini ada 4 aspek yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelayanan yang sudah dilakukan. (Murdiningsih, 2014)

Jurnal yang ketiga membahas mengenai inovasi pengelolaan sampah terpadu yaitu dengan cara membuat TPA menjadi taman rekreasi dan edukasi keluarga. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam inovasi pengelolaan sampah terpadu sudah cukup baik yaitu sudah adanya taman TPA Randegan, inovasi pengelolaan sampah basah, inovasi pengelolaan sampah kering. (Rizka Firdausia Fitri, 2019)

Dalam penelitian yang keempat membahas mengenai aspek organisasi pengelola sampah, operasionalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Sasayap Kabupaten Tana Tidung yang didasarkan pada 3 aspek yaitu : organisasi, interpretasi, dan aplikasi. (Putera, 2016)

Penelitian yang kelima membahas mengenai pengangkutan sampah, pelaksanaan pengangkutan sampah, tempah pembuangan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian pengelolaan sampah di Pasar Baru sebagai berikut: pertama, Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan yaitu pengangkutan sampah belum terkelola dengan baik. Kedua, target group yaitu tujuan pengangkutan pengelolaan sampah yang baik menjadi target Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjung Pinang belum terimplementasikan dengan maksimal. Ketiga, unsur implementor sudah terimplementasikan. (Rahman, 2016)

Dilihat dari beberapa penelitian diatas yang membedakan dengan tulisan penulis adalah permasalahannya yang dimana penulis membahas beberapa permasalahan. Pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Kedua, belum adanya penindakan dari tim khusus dilapangan ketika ada masyarakat yang melanggar. Ketiga, belum terlaksananya insentif dan disinsentif yang ada didalam perda nomor 6 tahun 2019 Kota Cimahi.

## HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi belum baik dan belum dimaksimalkan. Hal tersebut bisa dilihat sebagai berikut

### a. *Karakteristik Kebijakan*

Aturan mengenai Implementasi kebijakan peyelenggaraan pengelolaan sampah Kota Cimahi di Wilayah Pelayanan Leuwigajah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah. Dalam penerapannya, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi awalnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, yang dimana penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi. namun dikarenakan kebijakan tersebut belum optimal serta bagaimana mewujudkannya sehingga kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi menerbitkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pada saat ini kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Cimahi mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

### b. *Formasi Kebijakan*

Hill dan Hupe mengatakan bahwa faktor formasi Kebijakan turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Formasi kebijakan terdiri dari ukuran-ukuran dasar kebijakan dan tujuan kebijakan serta sumber daya ataupun insentif yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas serta sumber daya yang memadai tentunya membuat suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran kebijakan secara menyeluruh dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

### c. *Proses Transfer Kebijakan*

Proses transfer kebijakan termasuk salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan setiap tingkatan pelaksana mempengaruhi dampak implementasi kebijakan. Negara yang kebijakannya dilakukan oleh implementer dari berbagai level atau tingkatan membutuhkan transfer kebijakan yang benar

agar kebijakan yang diimplementasikan sampai tingkat bawah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam poses transfer kebijakan, dapat dilihat pula berbagai hambatan yang mungkin menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh implementor.

Aparatur harus mengetahui tupoksi masing - masing jabatan dengan profesional, DLH sudah memberikan pelatihan kepada aparatur dan berharap agar sesuai dengan apa yang telah diberikan diajarkan. sehubungan dengan Perda no 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sampah yang telah dikerjakan oleh aparatur telah berjalan sesuai rencana. konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada fasilitas yang belum mendukung.

**d. Faktor yang Mempengaruhi Badan Pelaksana**

Perilaku birokrat garda terdepan merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor ini bergantung bagaimana proses transfer informasi administrasi. Birokrat garda terdepan adalah sumber daya manusia yang secara langsung menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Dalam menjalankan perannya tersebut, birokrat garda terdepan menghadapi berbagai tantangan yang harus mereka pecahkan seperti berhadapan langsung dengan kelompok sasaran dengan situasi yang tidak menentu dan kompleks. Selain itu juga, interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan secara langsung dilapangan sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, perilaku birokrat garda terdepan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari informasi yang dijelaskan tersebut memberi makna, bahwa persoalan pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan peran yang harus dijalankan pertugas sangat penting, karena pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sangat ditentukan oleh pemahaman dan komitmen yang didasarkan pada tugas dan fungsi (tupoksi) serta tanggung jawabnya setelah melakukan pekerjaannya tersebut. Dari hasil pengamatan dan wawancara oleh informan I,II,dan III bahwa permasalahan persampahan yang berada di Kota Cimahi ini, bahwa ada beberapa pegawai yang disiplin dan ada juga pegawai yang kurang disiplin melaksanakan pekerjaannya, sehingga sampah dipinggir jalan makin menumpuk sehingga tidak optimal menjalankan pengangkutan sampah.

Karena masih longgarnya sistem pengawasan, ataupun adanya kendala teknis, misalnya kemacetan di jalan atau terganggunya kendaraan yang rusak (mogok), sehingga dapat mengganggu dalam menjalankan pekerjaan. Oleh karena itu, perlunya pembinaan dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yang dapat dilakukan melalui pertemuan – pertemuan atau rapat seperti rapat koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis dalam urusan pengelolaan sampah yang diselenggarakan secara rutin per satu bulan sekali. Selain mensosialisasikan setiap kebijakan maupun program agar para pegawai memperoleh pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran untuk memperkuat komitmen dalam merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan persampahan yang semakin kompleks..

Hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku pimpinan tempat. Dalam hal disposisi atau sikap pelaksana. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku birokrat garda terdepan, interpretasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ini terhadap tujuan kebijakan belum baik.

**e. Hubungan Inter-Organisasi Horizontal**

Faktor hubungan inter-organisasi horizontal merupakan kerjasama antar organisasi yang setara atau tidak berhierarki pertanggungjawabannya, dalam proses pengelolaan sampah di Kota Cimahi, DLH bekerja sama dengan Lembaga lain seperti Bank Bukopin, PLN, Twin Tulis Ware, dan PT. ZAS, mereka bekerjasama untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, Bank Sampah Cimahi juga mengelola sampah menjadi barang – barang bernilai jual dengan kerja sama dengan Twin Tulip Ware. Akan tetapi belum semua wilayah kelurahan kota Cimahi menggunakan Bank Sampah ini, masih banyak kelurahan yang belum bisa manfaat dari program kerja sama dari pihak luar terkait pengelolaan sampah. Kedepannya DLH akan memaksimalkan program agar Perda no 6 tahun 2019 bisa berjalan dengan baik.

**f. Respon Kelompok Sasaran**

Faktor respon kelompok sasaran mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Biasanya faktor ini berpengaruh terhadap kebijakan regulator, regulasi tersebut mempengaruhi pihak berkepentingan terutama yang diatur kuat (misalnya perusahaan besar) sehingga dalam proses kebijakan yaitu pembuatan kebijakan terdapat negosiasi tawar-menawar antara pemerintah dan pihak tersebut. Namun, apabila

hanya individu sebagai pengaruh yang memberikan umpan balik dalam kebijakan maka perlu ditekankan lagi perilaku birokrat garda terdepan. Respon dari aktor implementer yang lemah akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dilakukannya.

Respon kelompok sasaran terhadap kebijakan Dalam pengelolaan sampah peran pemerintah dari aspek aplikasi ialah sebagai fasilitator dan sebagai operator membutuhkan kosnsep dan strategi yang matang dan membutuhkan waktu yang panjang. Meskipun salah satu sumber sampah berasal dari masyarakat, namun pengelolaan sampah tetap tanggung jawab utamanya ada pada pemerintah, karena masyarakat sendiri belum mampu mengelola sampah yang telah dijelaskan dalam undang – undang, baik sikap, dan perilaku, yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

**g. Faktor Lingkungan Eksternal**

Menurut Hill dan Hupe, faktor lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kebijakan dapat secara efektif mengatasi masalah yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan suatu kebijakan.

Faktor lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa ada faktor sosial yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah).

Faktor sosial yang dimaksud adalah sudah membudayanya membuang sampah di lingkungan jalan di Leuwigajah Kota Cimahi ini. Para pembuang sampah sembarangan di lingkungan jalan Leuwigajah tersebut diantaranya adalah para pejalan kaki, pengendara motor atau pengendara mobil Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang pengelolaan sampah diketahui bahwa membuang sampah sembarangan memang sudah menjadi budaya yang buruk di sekitaran jalan di Leuwigajah, dibuktikan dengan banyaknya tumpukan sampah disekitaran jalan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Cimahi studi kasus pelayanan sampah di wilayah pelayanan sampah leuwigajah belum efektif. Hal ini dilihat dari belum terwujudnya maksud dan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, hal tersebut juga dapat dijelaskan melalui tujuh faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe yang belum sepenuhnya sesuai. Dari faktor karakteristik kebijakan, belum menerapkan implementasi kewenangan karena belum komitmennya pelaksana kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan. Dari faktor formasi kebijakan, pelaksana kebijakan belum melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019. Selain itu, sumberdaya kebijakan belum memadai, yaitu sumberdaya manusia yang belum memahami secara utuh konsep kebijakan pengelolaan sampah. Selanjutnya dari faktor proses transfer kebijakan belum terlaksana dengan baik dikarenakan hanya beberapa bagian saja yang memahami kebijakan pengelolaan sampah dengan baik. Lalu dari faktor yang mempengaruhi badan pelaksana, belum dilakukan kontrol atau pengawasan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah dan adanya sikap penolakan dari pelaksana dengan dibuktikan masih adanya pelaksana kebijakan bagian pengangkutan sampah yang melakukan sikap mogok kerja karena pembayaran yang sering telat. Dari faktor hubungan inter-organisasi horizontal, belum adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara khusus antara Dinas Lingkungan Hidup, berkerja sama dengan pihak luar untuk bertanggung jawab pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik, yaitu masih membudayanya buang sampah sembarangan disekitaran jalan leuwigajah. Hal ini menyebabkan baik kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan mewajarkan adanya tumpukan di kawasan jalan leuwigajah. Dari ketujuh faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe terdapat faktor yang paling mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan kawasan pengelolaan sampah di Kota cimahi. Faktor tersebut adalah sikap pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi ini yang harus berperan aktif bersosialisasi agar masyarakatnya ikut berperan aktif contoh yang paling sederhana membuang sampah pada tempatnya tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya reward dan punishment yang diatur dengan jelas.

Berdasarkan uraian simpulan maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi

pelaksana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah, sebagai berikut:

1. Sehubungan masalah persampahan yang kini semakin kompleks dan meluas dalam pengelolaannya, maka disarankan agar permasalahan sampah menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dilihat dari penyusunan program, anggaran yang harus memadai, kerjasama dan fungsi manajerial lainnya bisa lebih baik lagi.
2. Perlunya peningkatan pemahaman, kemampuan, serta motivasi aparat melalui pembinaan secara rutin dan pemberian insentif yang memadai, dan untuk mendorong kesadaran masyarakat maka perlu adanya pembinaan dan mengaktifkan lagi lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan lingkungan
3. Dalam kebijakan pengelolaan sampah ini sebaiknya ada petunjuk teknis yang mengatur jelas reward dan punishment dari mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu juga, dijelaskan bagaimana cara menjalankan reward dan punishment tersebut seperti wilayah perkecamatan yang terbersih bisa dijadikan contoh untuk wilayah yang lainnya.
4. Dinas Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola segala masalah persampah perlu menyusun dan merealisasikan program yang sudah ada dalam pengelolaan sampah secara berkesinambungan agar merespon tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
5. Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak organisasi luar sebaiknya melakukan koordinasi terkait pembinaan pengelolaan di Kota Cimahi. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi

## REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Alfiandra. (2009). *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Anderson, J. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Bunagin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Chandra, B. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, and Mix Methods Approaches: Fourth Edition* . Thousand Oaks: Sage Publications.
- Islamy, M. I. (2008). *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, A. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara - Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2019). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tajhjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Thoha, M. (2011). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wiersma, W. (1991). *Research Methods in Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Dokumen:
- Perda Nomor 6 Tahun 2019
- Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
- LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2018-2019
- RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2022
- Dokumen Informasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2019

